

BAB III

PERAN PEREMPUAN DALAM POLITIK NASIONAL JEPANG (1980-1990); ANALISIS MENURUT ‘TATANAN SIMBOLIK’ JACQUES LACAN

Seperti yang diungkapkan Mackie Vera (2003), patut disadari bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan negara, tidak hanya dipengaruhi oleh struktur institusional, tetapi juga ideologi yang berinteraksi dengan struktur ini melalui berbagai cara. Di masa pasca Perang, sebagian besar aturan-aturan yang mengekang kebebasan dan hak warga negara memang telah direvisi, tetapi kondisi dalam berbagai bidang sosial yang masih berbasis gender menjadikan perempuan dan laki-laki Jepang memasuki ruang publik dari lokasi sosial yang berbeda, dan hal ini menentukan legitimasi mereka dalam proses politik. Yang patut untuk diperjuangkan kelompok feminis Jepang adalah bagaimana perempuan harus mendapatkan identitas dan subjektivitas politik baru, yang dapat memposisikan perempuan sebagai kreator dari perubahan politik. Untuk memahami lebih lanjut tentang perempuan dalam politik nasional Jepang, perlu dipahami apa yang dimaksud dengan politik, negara, serta sistem pemerintahan.

3.1 Politik

Dalam buku *Pengantar Ilmu Politik*, disebutkan bahwa kata *politik*, berasal dari bahasa Yunani, *polis*, yang secara harfiah berarti ‘negara-kota’. Orang yang pertama kali menggunakan istilah ini adalah Aristoteles (384-322 SM) melalui pengamatannya yang menjelaskan bahwa ‘manusia pada dasarnya adalah binatang politik’. Maksud dari pernyataan tersebut adalah hakikat kehidupan sosial sesungguhnya adalah hubungan politik atau politik interaksi satu sama lain dari dua atau lebih orang yang merupakan kecenderungan alami manusia. Aristoteles berkesimpulan bahwa satu-satunya cara untuk memaksimalkan kemampuan seorang individu untuk mencapai bentuk kehidupan sosial tertinggi adalah melalui interaksi politik. Sejak tahun 1950-an, para ahli ilmu politik berkesimpulan bahwa politik

sebenarnya merupakan proses kompleks yang melibatkan sikap warga-negara dan kepentingan, kelompok organisasi, kegiatan pemilihan umum, dan *lobbying*, baik perumusan, penerapan dan penafsiran undang-undang (Rodee, 2000: 2-3).

Menurut Kate Millet (2005), terminologi 'politik' merujuk pada kekuatan relasi struktural yang disusun oleh suatu kelompok atau orang-orang tertentu yang dikontrol oleh orang lain. Idealnya, politik merupakan suatu susunan dari kehidupan manusia dalam persetujuan atau prinsip-prinsip rasional yang menaungi seluruh aspek kekuasaan. Kata 'politik' berhubungan dengan gender (*sex*) karena politik merupakan kata yang penting untuk mengembangkan kekuatan relasi psikologis dan filosofis yang kuat sehubungan dengan interaksi antar kelas, ras dan gender. Karena beberapa kelompok, termasuk perempuan, tidak memiliki representasi dalam jumlah yang sesuai pada struktur politik, menjadikan operasi terhadap mereka terus berlanjut.

Millet (2005) juga beranggapan bahwa dominasi seksual kemungkinan besar merupakan ideologi yang paling persuasif dalam budaya manusia, dan menghasilkan konsep dasar tentang kekuasaan. Hal ini terjadi karena masyarakat yang bersifat patriarkal. Setiap kekuasaan yang ada di masyarakat, seperti di bidang industri, teknologi, universitas, ilmu pengetahuan, politik, perkantoran dan keuangan, serta kebijakan-kebijakan yang dibuat di dalamnya, dikuasai oleh kaum laki-laki.

Politik, menjadi salah satu aspek dalam kehidupan sosial yang mendapat pengaruh besar dari kultur patriarki. Lebih jauh lagi, perempuan acapkali tidak mendapat kursi dalam lembaga-lembaga resmi pemerintah, bahkan pada beberapa kasus ---seperti di negara-negara Arab---, perempuan tidak mendapatkan kebebasan untuk keluar dari lingkup domestiknya.

3.2 Negara dan Bentuk Pemerintahan di Jepang

Negara adalah suatu perluasan dari keluarga, juga klan dan suku, yang dibangun untuk menjamin kehidupan warganya. Negara terdiri dari institusi-institusi formal yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan manusia, memiliki luas geografis, mempunyai pemerintah, mempunyai hubungan yang umumnya tetap antara sumber-sumber ekonomi dan kebutuhan penduduk, serta berbagai pola pertentangan dan

konsensus yang mencerminkan kebudayaan masyarakat. Mengutip pernyataan Burke, negara adalah suatu gagasan yang ada sepanjang masa, begitu pun ciri-cirinya yang diambil dari sejarah pemerintahan yang telah berlangsung lama, masing-masing ditandai oleh rangkaian krisis dan keberhasilannya (Rodee, 2000: 45-46).

Tiap negara memiliki sistem pemerintahan tersendiri. Jepang, merupakan negara yang menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Menurut Rodee (2000), warga negara dalam pemerintahan parlementer tidak memilih kepala negara secara langsung. Mereka memilih anggota-anggota dewan perwakilan rakyat, yang diorganisir ke dalam satu atau lebih partai politik. Sistem parlementer pada umumnya mengutamakan hubungan kelembagaan yang erat antara cabang eksekutif dan cabang legislatif pemerintahan. Kepala eksekutif adalah perdana menteri (seperti di Inggris) atau *premier* (seperti di Italia). Perdana menteri memilih menteri-menteri lainnya dalam pemerintahan, dan membentuk suatu Kabinet. Tiap menteri dalam kabinet bertanggungjawab melaksanakan departemen pemerintahan tertentu (contoh; pendidikan, perburuhan, luar negeri, dan sebagainya). Kabinet secara keseluruhan disebut sebagai 'pemerintahan', dan dipilih di dalam atau di luar jabatan eksekutif oleh mayoritas Parlemen (Rodee, 2000: 63-64).

Menurut Kishimoto (1977), Parlemen merupakan organ tertinggi negara, dan merupakan tulang punggung dari politik demokrasi parlementer Jepang. Berdasarkan Artikel 42 Konstitusi Jepang, Parlemen Jepang terdiri dari dua Majelis; *House of Representatives* (Majelis Rendah) dan *House of Councillors* (Majelis Tinggi). Sesuai dengan Artikel 41, Parlemen menjadi organ tertinggi negara dan satu-satunya organ legislatif negara di Jepang. Dalam Artikel 43 kemudian dijelaskan bahwa kedua Majelis terdiri dari anggota yang dipilih melalui pemungutan suara, sebagai representasi dari seluruh rakyat.

Sebagai hasil dari revisi Undang-Undang Pemilu (*Public Office Election Law*) pada bulan Juli 1975, jumlah kursi di *House of Representatives* atau Majelis Rendah terdiri dari 511 kursi dari total 130 pemilih distrik, yang masing-masing mengirim tiga sampai lima orang sebagai perwakilan di Majelis. Menurut Artikel 45 dari

Konstitusi, jangka waktu menjadi anggota Majelis Rendah adalah 4 tahun (Kishimoto, 1977: 49).

House of Councillors (Majelis Tinggi) terdiri dari 252 anggota, 100 diantaranya dipilih dari konstituensi ---hasil pemilihan--- nasional, dan 152 dipilih dari konstituensi prefektural. Berdasarkan Artikel ke 46 Konstitusi Jepang, jangka waktu menjadi anggota di Majelis Tinggi adalah 6 tahun, dan pemilihan bagi setengah anggota Majelis dilaksanakan tiap 3 tahun (Kishimoto, 1977: 50).

Legislasi, merupakan salah satu fungsi Parlemen, dan Parlemen sebagai organ legislatif negara, memonopoli kekuatan legislatif. Parlemen berwenang dalam menentukan hasil akhir dari pembuatan maupun keputusan hukum, dan tidak membutuhkan partisipasi dari organ lain, seperti Kekaisaran. Konstitusi juga menyebutkan bahwa Majelis Rendah dapat mengambil alih suara Majelis Tinggi dalam proses pembentukan atau penentuan hukum, karena menurut Artikel 59, sebuah Undang-Undang dapat diluluskan apabila mayoritas Majelis Rendah --- sebanyak $\frac{2}{3}$ anggota Majelis Rendah yang hadir--- menyetujuinya. Anggaran belanja negara harus disusun oleh Kabinet dan diberikan pada Parlemen untuk dilihat kembali dan disetujui, dan yang memiliki hak untuk meluluskan *draft* anggaran belanja negara tersebut adalah Majelis Rendah. Dalam Artikel ke 60 juga disebutkan bahwa apabila dalam proses pelulusan *draft* anggaran belanja negara terdapat perbedaan pendapat antara Majelis Tinggi dan Majelis Rendah, serta tidak ada titik temu antara keduanya, maka keputusan dari Majelis Rendah yang ditentukan sebagai keputusan Parlemen (Kishimoto, 1977: 54-56).

Selain dalam hal penentuan keputusan akhir dan penentuan anggaran belanja negara, Majelis Rendah juga diberikan kewenangan yang lebih tinggi dalam menentukan Perdana Menteri yang baru. Dalam Artikel 67 dari Konstitusi Jepang disebutkan bahwa apabila dalam menentukan calon Perdana Menteri terjadi perbedaan pandangan antara Majelis Rendah dan Majelis Tinggi, dan tidak dapat menemukan titik temu, atau Majelis Tinggi gagal untuk membuat keputusan dalam

10 hari, maka keputusan dari Majelis Rendah yang ditetapkan sebagai keputusan Parlemen²³ (Kishimoto, 1977: 56-57).

Penetapan Perdana Menteri oleh Parlemen merupakan bentuk dasar dari sistem kabinet Parlementer. Perubahan ini merupakan dasar dari terbentuknya negara demokrasi parlementer, yang tidak memihak pada satu otoritas tertinggi, melainkan kepentingan seluruh rakyat, dengan diwakilkan oleh suara dari tiap-tiap anggota Parlemen.

3.3 Sekilas Gerakan Feminisme Jepang dan Perempuan dalam Parlemen Nasional Pasca Perang

Dalam menelaah sejarah feminisme Jepang, kaum feminis Jepang menekankan bahwa ada beberapa konsep yang penting agar situasi mereka dapat dimengerti. Menurut Mackie (2003), di Jepang, seperti pada negara kapitalis lainnya, modernisasi juga memicu perkembangan relasi yang berbasis kelas dan gender. Kesadaran feminis juga merupakan bentuk yang muncul dari perkembangan modernitas²⁴ di Jepang. Nasionalisasi Jepang turut serta membangunkan kaum feminis untuk merespon identitas nasional yang ternyata masih menjadikan kaum perempuan sebagai kaum yang termarginalisasi, terutama dalam komunitas nasional dan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan nasional.

Pada Pemilu pertama pasca Perang tahun 1946, jutaan perempuan yang baru mendapatkan haknya dalam Pemilu berdatangan ke tempat pemungutan suara untuk pertama kalinya. Sesuai dengan diungkapkan Iwao (1993), walau saat itu muncul

²³ Sebenarnya, kedua Majelis hampir selalu mencapai kesepakatan dalam penentuan Perdana Menteri, terkecuali pada masa pemerintahan Parlemen ke-2, setelah jatuhnya Kabinet Katayama. Saat itu Majelis Rendah mengusung Hitoshi Ashida, sedangkan Majelis Tinggi mengusung Shigeru Yoshida. Keputusan akhir menetapkan calon dari Majelis Rendah yang menjadi Perdana Menteri karena kesepakatan antara kedua Majelis tidak kunjung tercapai (Kouichi Kishimoto, 1977: 57).

²⁴ Modernitas dideskripsikan sebagai kesatuan kondisi sosial dan ekonomi, termasuk kapitalisme, birokrasi, dan perkembangan teknologi yang dipadukan dengan pengalaman dan kesadaran sejarah. Dalam kasus Jepang, definisi 'tradisi' dan 'modernitas' dibatasi oleh transformasi dari ekonomi feodal; relasi hierarkis; dan aturan militer dari Shogun, menuju kapitalisme, dimana di dalamnya turut serta penemuan-penemuan teknologi; produksi industri; urbanisasi masal; perdagangan kapitalis dan pembentukan negara konstitusional (Vera Mackie, 2003: 2).

kekhawatiran bahwa perempuan akan bersikap apatis terhadap Pemilu, tetapi faktanya pemungutan suara diikuti 67% perempuan, dan 79% laki-laki. Hal ini merepresentasikan pentingnya suara perempuan dalam Pemilu. Selain itu, 79 kandidat perempuan diikutsertakan dalam pemilihan, dan 39 kandidat perempuan ---sekitar 8,4%--- berhasil memenangkan kursi di Majelis Rendah. Tujuh orang diantaranya merupakan anggota dari gerakan yang menuntut hak-hak berpolitik bagi perempuan di masa sebelum perang. Namun meski para perempuan berhasil ikut serta dalam pemungutan suara, dan beberapa berhasil menduduki kursi di Parlemen, tetapi partisipasi mereka dalam politik nasional dapat dikatakan sangat minim.

Jumlah pemilih perempuan pada tahun 1946 ini, entah bagaimana, tidak pernah terulang kembali, sehingga dalam representasinya di politik nasional, perempuan tetap berada di tingkat yang rendah. Meskipun pada periode 1945-1976 jumlah perempuan di Majelis Tinggi sedikit demi sedikit meningkat, tetapi jumlah perempuan di Majelis Rendah menurun drastis sejak 1946. Berikut tabel yang menunjukkan jumlah perempuan di Parlemen Nasional sejak tahun 1946-1976:

Tabel 3.1 Persentase Perempuan dalam Majelis Rendah 1946-1976

PEMILIHAN MAJELIS RENDAH		
PEMILU	Jumlah Perempuan Yang Terpilih	Persentase dari Keseluruhan Anggota Parlemen
Ke-22 (10 April 1946)	39	8,4
Ke-23 (25 April 1947)	15	3,2
Ke-24 (23 Januari 1949)	12	2,6
Ke-25 (1 Oktober 1952)	12	2,6
Ke-26 (19 April 1953)	9	1,9
Ke-27 (27 Februari 1955)	8	1,7
Ke-28 (22 Mei 1958)	11	2,4
Ke-29 (20 November 1960)	7	1,5
Ke-30 (21 November 1963)	7	1,5
Ke-31 (29 November 1967)	7	1,4

Ke-32 (27 Desember 1969)	8	1,6
Ke-33 (10 Desember 1972)	7	1,6
Ke-34 (5 Desember 1976)	7	1,4

Tabel 3.2 Persentase Perempuan dalam Majelis Tinggi 1946-1976

PEMILIHAN MAJELIS TINGGI		
PEMILU	Jumlah Perempuan yang Terpilih	Persentase dari Keseluruhan Anggota Parlemen
Ke-1 (20 April 1947)	11	4,4
Ke-2 (4 Januari 1950)	12	4,8
Ke-3 (24 April 1953)	19	7,6
Ke-4 (8 Juli 1956)	15	6,0
Ke-5 (2 Januari 1959)	13	5,2
Ke-6 (1 Juli 1962)	17	6,8
Ke-7 (4 Juni 1965)	17	6,8
Ke-8 (7 Juli 1968)	13	5,4
Ke-9 (12 Juni 1971)	13	5,4
Ke-10 (7 Juli 1974)	18	7,1

Sumber: Kementerian Ketenagakerjaan, Perempuan dan Minoritas. *The Status of Women in Japan*. 1977. Hal 3

Walau pada masa pasca Perang perempuan sudah mendapat hak memilih dan dipilih dalam politik nasional, tetapi ideologi mengenai femininitas perempuan masih menyulitkan kaum perempuan Jepang untuk aktif di ruang publik. Gender, mau tidak mau selalu mempengaruhi relasi individu dengan negara (Mackie, 2003: 9). Pada periode pasca Perang, sejumlah perempuan dapat melakukan aktifitas politik mereka, tanpa melawan konsep femininitas, tetapi cenderung tidak mengarahkan secara langsung kegiatan politik mereka untuk berpartisipasi di Parlemen.

Secara khusus, banyak dari feminis tahun 1960-an yang tidak setuju dengan perang Vietnam, kebijakan kaum birokrat dan aspek teknologi dari masyarakat kapitalis modern. Aktifis perempuan pada masa ini menggambarkan ketidakpuasan

mereka terhadap diskriminasi gender yang mereka terima dari aktifis-aktifis laki-laki yang memposisikan mereka pada pekerjaan ‘perempuan tradisional’ (misal; juru ketik), dan tidak menerima jika perempuan dapat menduduki posisi yang strategis, seperti sebagai pembuat keputusan dalam organisasi sentral. Gerakan feminis pada masa ini juga menyerang nilai-nilai budaya yang berasosiasi dengan ‘keajaiban ekonomi’ di tahun 1960-an yang menilai rendah perempuan, karena mereka kurang produktif dari laki-laki berdasar pada peran reproduksi mereka (Mackie, 2003: 1).

Pada tahun 1970-an, beberapa kelompok perempuan mempertanyakan isu-isu strategis dan mempertanyakan kebijakan militer sehubungan dengan pembaharuan Perjanjian Jepang-AS tahun 1960. Pada periode ini juga muncul beberapa kelompok yang memperjuangkan hak-hak perempuan. Salah satu kelompok yang menamakan diri mereka *Tatakau Onna Tachi*, melawan stereotipe feminin melalui penggunaan nama ‘*Fighting Women*’. Selain itu, ada pula kelompok *Koodoo Suru Kai*²⁵ yang

²⁵ Di akhir tahun 1974, anggota Parlemen Ichikawa Fusae dan Tanaka Sumiko ---keduanya perempuan--- mengumpulkan sejumlah kalangan perempuan dari kelompok penulis, akademisi, negarawan dan birokrat untuk berkumpul bersama mendiskusikan baik partisipasi secara resmi maupun partisipasi melalui organisasi non pemerintah ---NGO, dan sebagainya--- dalam konferensi perempuan internasional di Meksiko tahun mendatang (1975). Mereka lalu membentuk kelompok *Woman's Year Action* atau *Koodoo Suru Kai* yang disahkan pada tanggal 13 Januari 1975. Mereka mengeluarkan pernyataan publik untuk melakukan aksi, berikut pernyataannya:

"Saat ini, sudah hampir 30 tahun sejak kesetaraan gender dituangkan dalam Undang-Undang. Akan tetapi, pandangan tradisional mengenai *danson joshi* (menghormati laki-laki, merendahkan perempuan) telah mengakar kuat dalam pemikiran masyarakat, dan diskriminasi perempuan terus berlangsung pada bagian integral dalam setiap bidang sosial, seperti di bidang pekerjaan, urusan domestik (rumah tangga), dan pendidikan. Kami merasakan kemarahan yang besar karena baru-baru ini, diskriminasi tersebut telah berpindah dan masuk ke dalam ranah tatanan masyarakat. Walaupun masyarakat terdiri dari laki-laki dan perempuan, sistem sosial bersifat androsentris, dan kehidupan perempuan sangat dibatasi. Kami harap kami dapat melihat cara pandang baru dari masyarakat dimana perempuan dapat lebih dihormati, karena perempuan yang melahirkan kehidupan baru, sehingga kebutuhan dan kelayakan hidup bagi mereka perlu dijamin, dan perlu dibuka peluang bagi kaum perempuan untuk berpartisipasi secara penuh di dalam masyarakat. Untuk tujuan ini, kami perlu merubah ide bahwa kepengurusan anak adalah kewajiban perempuan saja. Kami perlu untuk menilai hasilnya dan memberikan kesempatan pada konsep ‘kesetaraan gender’ untuk membuktikannya. Kami ingin mengkreasikan suatu budaya baru dan masyarakat baru dimana tiap laki-laki dan perempuan dapat memilih gaya hidupnya masing-masing, menurut keinginan dan kepribadiannya masing-masing. Sebagai dasar dari keinginan ini, kami akan mempergunakan kesempatan dalam *International Women's Year* untuk mengambil aksi, dan kami tidak akan berhenti beraksi sampai tujuan kami tercapai." Pernyataan dari kelompok perempuan yang mengambil aksi dalam *Occasion of International Women's Year* (Vera Mackie, 2003: 177). Pernyataan ini tentunya menjadi pembuktian dari tumbuhnya nilai-nilai kesadaran baru di kalangan perempuan, khususnya kaum feminis di Jepang. Apa yang diungkapkan dalam pernyataan ini, menggambarkan konsep kesetaraan gender yang sesuai dengan nilai-nilai posfeminis, dimana yang terpenting bukan hanya ‘kesamaan’ tugas antara laki-laki

memperjuangkan kesetaraan gender. Gerakan "*The New Seitoo*" juga muncul dan merevisi kembali apa yang dicita-citakan kelompok "*Bluestocking*" tahun 1910 dulu (Mackie, 2003: 8). Beberapa feminis Jepang di tahun 1970 juga mengeksplorasi kembali sejarah feminisme Jepang, terutama di tahun-tahun 1870-an (Mackie, 2003: 1). Pada periode ini, kaum feminis banyak memperjuangkan permasalahan anak-anak, upah buruh, penyetaaraan kesempatan di bidang edukasi dan ketenagakerjaan, pasifisme, pekerja imigran, serta membentuk koalisi dengan kelompok lainnya untuk mengakses aspek-aspek kontrol reproduksi (Mackie, 2003: 175).

3.4. Peran Perempuan Jepang dalam Politik Nasional Jepang 1980-1990

Politik nasional di Jepang, seperti pada negara dengan bentuk masyarakat patriarki lainnya, merupakan cerminan dari dominasi laki-laki. Aturan-aturan yang berlaku menjadi batasan untuk mentransformasi kekuatan perempuan dalam keluarga, masyarakat, maupun sistem politik. Walaupun dalam Konstitusi pasca Perang perempuan mendapatkan hak berpolitik yang setara dengan laki-laki, tetapi kenyataannya partisipasi perempuan dalam perpolitikan nasional tidak lebih dari sebagai pemilih. Sedangkan peran mereka di Majelis Rendah, Majelis Tinggi dan Kabinet, terbilang rendah. Menurut data yang diperoleh dari Inter Parliamentary Union (IPU), dari 187 negara, persentase perempuan di Parlemen Jepang hanya menempati urutan ke-105, bahkan masih di bawah Indonesia yang menempati urutan ke-74.

dan perempuan, tetapi lebih kepada kesetaraan dan hak-hak untuk memilih apa yang mereka anggap sesuai dengan kepribadian masing-masing individu, baik laki-laki dan perempuan. Pernyataan ini juga merupakan langkah penting bagi penyadaran kaum perempuan Jepang, bahwa tugas domestik bukanlah sesuatu yang menjadi semata-mata kewajiban sang istri, tetapi merupakan kewajiban dari pasangan suami-istri. Meskipun begitu, realisasi dari pernyataan kelompok *Woman's Year Action* ini juga tidak dapat diterapkan saat itu juga dalam masyarakat, karena konsep 'ide' yang sudah melekat dalam ranah pemikiran masyarakat umum tentu tak dapat serta merta diubah, dan memerlukan proses yang tidak singkat. Setelah pertemuan tanggal 13 Maret 1975, pertemuan-pertemuan yang mendiskusikan tema keperempuanan banyak digelar di Women Suffrage Hall, seperti pertemuan pada bulan April tahun 1975 yang mendiskusikan pengalaman diskriminasi perempuan dari masa kanak-kanak hingga usia tua. Pertemuan September 1975 yang berfokus pada media masa dan pengembangan rencana untuk mengkonfrontasikan media masa dsb (Vera Mackie, 2003: 177).

Tabel 3.3 Klasifikasi Negara berdasarkan Persentase Perempuan di Parlemen

Rank	Country	Lower or single House				Upper House or Senate			
		Elections	Seats*	Women	% W	Elections	Seats*	Women	% W
1	Rwanda	9 2008	80	45	56.3%	10 2003	26	9	34.6%
2	Sweden	9 2006	349	164	47.0%	---	---	---	---
3	South Africa	4 2009	400	174	43.5%	4 2009	54	16	29.6%
4	Cuba	1 2008	614	265	43.2%	---	---	---	---
5	Iceland	4 2009	63	27	42.9%	---	---	---	---
"	---	---	---	---	---	---	---	---	---
74	Indonesia	4 2009	560	93	16.6%	---	---	---	---
"	---	---	---	---	---	---	---	---	---
105	Japan	9 2005	480	45	9.4%	7 2007	242	44	18.2%

Sumber: <http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm> diakses 15 Juli 2009

Laki-laki Jepang, umumnya melihat arena politik sebagai salah satu wilayah penting bagi aktualisasi diri, dan tentu saja politik juga memberi akses terhadap kekuasaan, kebanggaan dan kesuksesan²⁶ (Iwao, 1993: 214). Perempuan dianggap

²⁶ Satu hal yang menjadi kekurangan dalam perpolitikan Jepang, seperti yang dikatakan Sumiko Iwao (1993) dalam bukunya *Japanese Women*, adalah minimnya komunikasi verbal dalam forum, seperti dalam penetapan kebijakan, termasuk saat Pemilu. Para pemilih lebih memperhatikan karakter pribadi dari kandidat yang akan dipilih, seperti; kebaikannya, cara bicara, atau tampilannya yang dapat dipercaya, dibandingkan dari isi kebijakan yang akan diterapkan kandidat tersebut jika terpilih. Tidak sedikit perempuan Jepang yang cenderung memperhatikan penampilan dari para kandidat seperti dasi yang dikenakan, sampai bagaimana cara istri mereka berdandan. Dalam survei yang diselenggarakan pada tahun 1980-an, laki-laki maupun perempuan Jepang setuju bahwa penampilan para kandidat di media, serta bagaimana opini masing-masing kandidat, sangat mempengaruhi pilihan mereka saat pemilu. Namun tidak sedikit yang mengatakan bahwa mereka tidak mengerti apa yang dibicarakan kandidat. Singkatnya, daripada hal-hal yang bersifat prinsip, masyarakat masih menilai penampilan luar sebagai faktor utama yang mempengaruhi sikap mereka dalam memilih wakil rakyat.

tidak cocok dengan posisi yang berhubungan dengan kebijakan politik, ekonomi, keamanan, atau diplomasi.

Proses demokrasi politik di Jepang dapat dikatakan berjalan lambat, terutama menyangkut hak-hak perempuan dalam berpolitik, yang baru dapat berfungsi secara efektif pasca Perang Dunia II, serta menggunakan sistem Barat sebagai tolak ukur. Hal ini juga melatari sikap 'defensif' perempuan Jepang terhadap politik, yang dianggap sebagai pekerjaan yang 'kotor', dekat dengan korupsi, tidak sesuai dengan nilai-nilai hidup mereka, dan tidak berhubungan langsung dengan kehidupan kaum perempuan.

Perempuan cenderung tidak melihat peran gender yang tidak seimbang di dunia politik. Mereka cenderung tidak menganggap politik sebagai suatu alat yang penting untuk meningkatkan status dan martabat perempuan²⁷. Sebagian besar perempuan, lebih tertarik untuk aktif di bidang yang bersifat lokal, dan sepertinya tidak muncul dalam benak mereka bahwa suara terbaik bagi perempuan adalah apabila perwakilan dari mereka menduduki parlemen nasional. Faktanya, di Jepang memang terjadi *gap* yang besar antara laki-laki dan perempuan dalam keikutsertaannya di bidang politik.

Menurut Pharr (1981), hingga tahun 1980-an, sikap sosial sebagaimana struktur dan operasi dari partai politik besar, bekerja seolah melawan aktifitas politik perempuan. Ia mengemukakan bahwa masyarakat Jepang menyadari bagaimana peran perempuan yang mengendalikan politik, dianggap tidak sesuai dengan tanggung jawabnya di area domestik.

Memasuki periode 1980-1990, kesadaran kaum perempuan mengenai pentingnya kesetaraan gender yang sudah terbentuk sejak era 1970-an, semakin meningkat²⁸. Seperti yang dikemukakan Mackie (2003), dalam politik lokal²⁹

²⁷ Meskipun memiliki latar belakang dari keluarga politisi, hanya sedikit perempuan yang memilih berkarir di bidang politik. Dikala politik telah terbuka bagi para perempuan, karir politik dinilai masih dapat menimbulkan konflik dengan nilai, norma, serta peran-peran perempuan yang sudah dibentuk selama ratusan tahun (Iwao, 1993: 216).

²⁸ Salah satu isu yang menjadi fokus utama gerakan feminisme Jepang pada periode 1980-1990 adalah mengenai hak untuk mewariskan identitas nasional kepada anak mereka. Dalam usaha untuk

maupun nasional di periode 1980-an, terjadi perdebatan seputar sikap badan legislatif yang cenderung mengkotakan perempuan, termasuk di dalamnya ketidaksetaraan gender dan ketidaksetaraan dalam sistem lainnya yang berbasis kelas, ras, dan etnik.

Perubahan sikap dalam gerakan yang berbasis komunitas lokal, melatarbelakangi peningkatan jumlah kandidat perempuan yang berkampanye untuk memenangkan kursi di Parlemen. Dalam ‘Kertas Putih’ tahun 1997 memuat data mengenai perempuan, dilaporkan bahwa pada tahun 1974, 51,6 % dari responden perempuan mengekspresikan sejumlah ketertarikan dalam politik bila dibandingkan dengan tahun 1951 yang hanya 35% (Soorifu, 1997: 20). Berikut tabel yang menunjukkan peningkatan jumlah perempuan dalam Dewan Lokal:

memudahkan anak dalam mendapatkan identitas ke Jepangannya, Konstitusi nasional direvisi kembali pada tahun 1985. Di bawah Konstitusi yang telah direvisi, identitas nasional bangsa Jepang dapat diberikan melalui pihak laki-laki maupun perempuan. Untuk mendapatkan identitas Jepang dari anak yang dilahirkan oleh pasangan ayah berkewarganegaraan Jepang dan ibu berkewarganegaraan non Jepang, penting bagi sang ayah untuk memberikan pengetahuan mengenai konsep ‘identitas’ kepada sang anak. Dengan tingginya jumlah pekerja imigran yang tinggal di Jepang pada tahun 1980-an, keinginan perempuan untuk mengontrol kapasitas reproduksi mereka sekali lagi menjadi subjek kontroversi (Vera Mackie, 2003: 192).

²⁹ Menurut direktur *Women Centre* Propinsi Kanagawa, sampai awal tahun 1980-an, perempuan lebih banyak mengambil bagian dalam komunitas-komunitas lokal, khususnya dalam gerakan yang berkaitan dengan lingkungan, ketertarikan konsumen, kesejahteraan anak-anak dan manula, serta proyek-proyek budaya seperti pendirian perpustakaan, pusat kegiatan masyarakat dan pusat kegiatan perempuan. Hal ini merupakan bentuk besarnya kepedulian perempuan dalam gerakan perdamaian sejak pasca PD II. Pengalaman mereka dalam gerakan lokal ini menuntun mereka pada kesadaran terhadap pentingnya membawa aspirasi politik dalam pemerintahan. Contoh konkrit dalam strategi politik baru ini adalah gerakan yang dipimpin perempuan untuk melawan perusakan hutan di daerah Ikego di propinsi Kanagawa, selatan Tokyo, untuk konstruksi perumahan bagi anggota militer AS yang memiliki pangkalan di wilayah tersebut. Karena frustrasi dengan tindakan pemerintah yang menolak untuk mendengar mereka, para perempuan mengejar representasi mereka sendiri dalam dewan perwakilan daerah Kotamadya pada tahun 1986. Walaupun mereka tidak memenangkan mayoritas kursi, tetapi 4 kandidat utamanya merupakan aktifis perempuan dari gerakan tersebut. Pada tahun berikutnya, 31 perempuan berafiliasi dengan *Seikatsu Club Seikyoo* ---suatu network nasional untuk meningkatkan taraf hidup melalui penyediaan makanan organik--- dan berhasil memenangkan kursi dalam Dewan Kota di daerah Tokyo (Sato, 1995: 367).

Tabel 3.4 Persentase Perempuan Dalam Lembaga Dewan Lokal

Tahun	Persentase (%)
1976	1,0
1980	1,2
1985	1,6
1986	1,7
1987	2,2

Sumber: Sumiko Iwao (1993), *Japanese Women*. Hal. 219. “Telah diolah kembali”

Tabel 3.5 Jumlah dan Presentase Perempuan yang Menduduki Dewan Lokal (1984-1990)

Tahun	Jumlah	Persentase (%)
1984	1.078	1,5
1985	1.102	1,6
1986	1.154	1,7
1987	1.447	2,2
1988	1.480	2,2
1989	1.562	2,4
1990	1.633	2,5

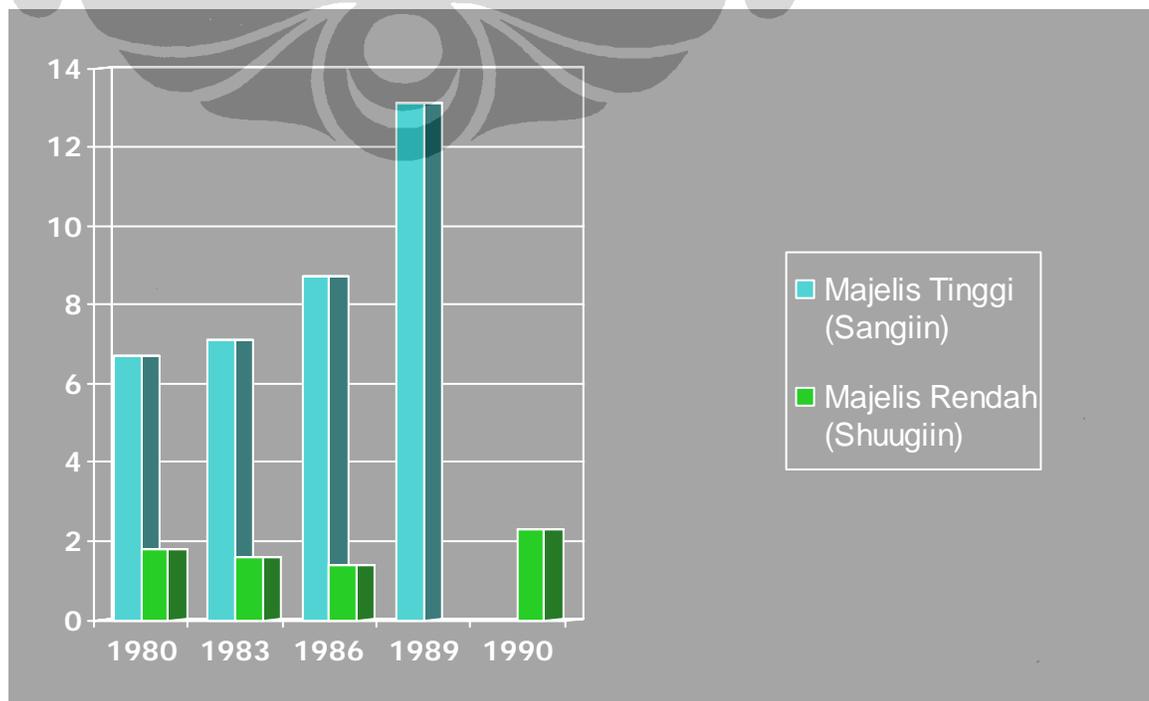
Sumber: *Women in Japan Today*, Office for Gender Equality. “Telah diolah kembali”

Meskipun tidak signifikan, pada periode 1980-1990 jumlah perempuan dalam Dewan Lokal meningkat setiap tahunnya. Namun perlu disadari, meski terdapat peningkatan jumlah perempuan di politik lokal, hal tersebut tidak serta merta mengubah pandangan kaum laki-laki mengenai peran perempuan di bidang politik, khususnya untuk mendapatkan jabatan strategis. Partai-partai besar dan praktek

kampanye yang membutuhkan biaya dan dukungan tinggi juga masih mempersulit perempuan untuk dapat berdiri sebagai kandidat di Parlemen Nasional.

Dalam politik nasional, walaupun perempuan menjanjikan persentase yang substansial sebagai anggota partai ---40% dari anggota Partai Liberal Demokrat pada awal dekade 1990 adalah perempuan--- (Edwards, Roches&Mina, 2000: 218), tetapi hanya sedikit perempuan yang dinominasikan sebagai kandidat dalam Pemilu. Perempuan mendukung berbagai aktifitas partai, seperti mempersiapkan makanan dan menelepon kolega bagi kepentingan para kandidat laki-laki, tetapi tugas-tugas tersebut justru semakin memposisikan para politisi perempuan ke dalam pekerjaan yang berhubungan dengan tugas domestik. Sesuai dengan yang diungkapkan Edwards (2000), sistem keluarga tradisional yang masih mengakar dan minimnya dukungan partai menyulitkan perempuan untuk mendapatkan haknya sebagai anggota partai yang layak menjadi kandidat anggota Parlemen. Meskipun demikian, pada periode 1980-1990 terdapat indikasi peningkatan jumlah perempuan di Parlemen, meskipun tentu saja, jumlah ini masih jauh dibawah negara-negara industri maju lainnya ---lihat tabel 3.3--- . Berikut grafik yang menunjukkan persentase perempuan di Majelis Rendah dan Majelis Tinggi periode 1980-1990

Grafik 3.1 Persentase Perempuan di Majelis Rendah dan Majelis Tinggi Periode 1980-1990



Sumber: Mariko Bando, 2001: 97. 'Telah diolah kembali'.

Dari grafik diatas, dapat dilihat peningkatan persentase perempuan di Majelis Tinggi pada periode 1980-1990. Persentase perempuan di Majelis Tinggi tidak diimbangi dengan persentase perempuan di Majelis Rendah yang rata-rata masih di bawah 2% ---meskipun pada pemilihan tahun 1990 berhasil meningkat menjadi 2,3%---

Kemunculan tokoh perempuan kharismatik Doi Takako sebagai pemimpin perempuan pertama dari partai oposisi utama; Partai Sosial Demokrat, di akhir tahun 1980-an, memang terlihat sebagai sinyal dari era baru partisipasi perempuan dalam politik. Grafik diatas menunjukkan bahwa pada pemilihan Majelis Tinggi tahun 1989 ini, anggota perempuan dalam Parlemen meningkat tajam menjadi 13,1%. Dari sebagian besar periode pasca Perang, perempuan hanya meraih 3% dari total jumlah kursi di kedua Majelis ---dengan mengecualikan jumlah perempuan yang terpilih saat pemilihan tahun 1946---. Sampai tahun 1989, hanya 5 perempuan yang dapat mencapai posisi di Kabinet. Menurut Mackie (2003), terpilihnya 22 perempuan di Majelis Tinggi pada tahun 1989 ---meningkat sekitar 10 orang dari pemilihan sebelumnya--- merupakan apa yang disebut media sebagai "Fenomena Madonna"³⁰. Hal ini merupakan perubahan besar dalam perpolitikan Jepang.

Partai Liberal Demokrat kalah dalam perolehan kursi mayoritas di Majelis Tinggi untuk pertama kalinya dalam periode pasca Perang dalam pemilihan tahun 1989. Ini dikarenakan kebijakan terhadap pajak konsumsi yang baru dan ketidakpuasan terhadap penanganan skandal politik, yang pada akhirnya meningkatkan dukungan terhadap kandidat perempuan dari Partai Sosialis Demokrat.

³⁰ Media yang didominasi laki-laki juga banyak membahas mengenai keberhasilan perempuan dalam menduduki Parlemen. Media merespon kemunculan perempuan di Parlemen Jepang sebagai '*Madonna boom*' ---Fenomena Madonna---, dan menyebut perempuan yang aktif di bidang politik sebagai '*Joan of Arc*' versi Jepang. Doi Takako merupakan fokus dari atensi media, dan ia harus bertahan dengan kritik media serta politisi partai konservatif yang sulit untuk menerima kenyataan keberadaan pemimpin perempuan dan politisi perempuan yang sukses, perempuan mandiri yang mendapatkan haknya sendiri, bukan hanya mengabdikan bagi kesuksesan ayah atau suaminya (Vera Mackie, 2003:196).

Dapat dikatakan perkembangan sejak tahun 1980-an merupakan demonstrasi dari kesadaran politik yang baru, terutama bagi para ibu rumah tangga Jepang³¹ (Mackie 2003: 220).

Akan tetapi, terkecuali Doi Takako, tidak ada politikus perempuan Jepang yang mampu menempati posisi strategis di bidang pemerintahan, dan tidak ada organisasi politik yang secara efektif mendukung perempuan untuk terjun di bidang politik. Umumnya, baik laki-laki maupun perempuan Jepang, masih menganggap politik sebagai dunia laki-laki (Iwao, 1993: 217). Peningkatan ini tidak merefleksikan perubahan mendasar mengenai peran perempuan dalam politik. Dari segi jumlah, perempuan masih belum memaksimalkan representasinya dalam keanggotaan Parlemen. Sejalan dengan pendapat Iwao (1993), meskipun sudah berhasil menjabat sebagai ketua partai, hari dimana perempuan dapat menduduki jabatan strategis seperti Perdana Menteri sepertinya masih jauh dari angan-angan. Sedikitnya perempuan yang diposisikan sebagai pembuat keputusan dalam suatu institusi besar dan ruang publik merupakan hasil dari kebijakan yang bias gender.

3.4.1 Perempuan dalam Politik Nasional sebagai Objek dari Subjektivitas Maskulin

Sesungguhnya apakah benar apabila dikatakan perempuan Jepang di tahun 1980-an telah berhasil meraih mimpinya untuk menduduki jabatan politik yang strategis. Meskipun keberadaan perempuan ---walau dalam jumlah yang relatif sedikit--- merupakan suatu keberhasilan tersendiri dalam kancah perpolitikan Jepang

³¹ Artikel di tahun 1990 yang berjudul 'dari *okusan* hingga *sotosan*' dalam majalah perempuan *Wife*, menyatakan adanya peningkatan keikutsertaan para ibu rumah tangga dalam aktifitas di luar rumah (Sato, 1995: 366). Terminologi '*okusan*' memiliki arti 'seseorang yang berada dalam bagian dalam (rumah)', yang dimasa lalu merupakan penghormatan terhadap istri-istri kelas menengah ke atas yang dapat menjadi ibu rumah tangga. Tetapi pada periode pasca Perang, terminologi ini mengacu pada semua ibu rumah tangga (Edwards, Roches&Mina, 2000: 218). Terminologi '*sotosan*' berarti 'seseorang yang berada di luar', yang mengacu pada perempuan di awal tahun 1990 yang tidak lagi merasa harus selalu berada di dalam rumah. Hal ini merefleksikan tingginya kesadaran diantara perempuan Jepang mengenai isu gender yang muncul pada tahun 1970-an dan 1980-an (Edwards, Roches&Mina, 2000: 218).

yang didominasi kaum laki-laki, tetapi memang yang terjadi sebenarnya, kekuatan perempuan dalam bidang politik masih merupakan bentukan dari cara pandang, dan kepentingan dari para politisi laki-laki. Hal ini menggambarkan keberadaan 'subjektifitas maskulin' dalam arena perpolitikan Jepang.

Subjektifitas, seperti yang telah disebutkan dalam Bab II, berisi percampuran antara kode-kode sosial dan bermacam-macam bentuk ideologi yang berbeda-beda. Subjektifitas dalam bidang politik di Jepang dapat terlihat penempatan posisi politisi perempuan yang cenderung mengarah pada aplikasi dari domestikasi perempuan. Maskulinitas, yang menjadi konsep dasar dari sistem patriarki, memainkan peran yang dominan dalam pemikiran para politisi laki-laki Jepang. Tanpa bermaksud mempersalahkan, perempuan mau tak mau semakin terasing ke dalam wilayah yang dikonstruksi oleh pemikiran kaum laki-laki, dan dalam kasus politik, hal ini terlihat dalam peran dan posisi perempuan yang direkonstruksi oleh pemikiran, maksud, serta tujuan dari para politisi laki-laki.

Menurut Murgai (1999), Jepang termasuk kepada negara yang memiliki unsur maskulinitas yang dominan. Dalam tabel berikut, Murgai menganalisa karakteristik budaya yang dominan pada empat negara, dengan menggunakan skala kriteria Hofstede tahun 1980:

Tabel 3.6 Skala Kriteria Hofstede

Hofstede's Criteria				
Criteria	USA	INDIA	SINGAPORE	JAPAN
Individualism ³²	91	48	20	46

³² Kriteria yang menyangkut pola individual maupun kolektif dalam relasi sosial. Nilai individual maupun kolektif pada masing-masing anggota masyarakat akan sangat menentukan hubungan antara masyarakat dan organisasi maupun instansi di dalamnya (Hofstede, 1980: 373-374).

Power Distance ³³	40	77	74	54
Uncertainty avoidance ³⁴	46	40	8	92
Masculinity	62	56	48	95

Sumber: <http://www.ifla.org.sg/IV/ifla65/papers/093-113e.htm> Hal. 2

Tabel diatas menunjukkan bahwa Jepang merupakan salah satu Negara yang memiliki karakter maskulinitas yang dominan, bahkan menurut skala Hofstede, karakter maskulinitas di Jepang hampir mencapai maksimal. Unsur maskulinitas yang dominan, menggambarkan kultur patriarki yang masih mengakar kuat dalam masyarakat. Hal ini sangat berpengaruh bagi para perempuan Jepang yang berkeinginan untuk aktif di ruang publik, khususnya bidang politik, karena aturan-aturan sosial dalam masyarakat telah mengkonstruksi kaum laki-laki sebagai karakter yang ideal sebagai pemimpin. Dengan kuatnya unsur maskulinitas ini, dominasi laki-laki di dunia politik sulit untuk dihindari. Sebagai contoh, lihat tabel 3.7;

³³ Kriteria dalam organisasi yang menyangkut ketidaksetaraan kekuasaan antara pimpinan dan bawahan. Hal ini merupakan ukuran dari kekuatan interpersonal serta menggambarkan pengaruh antara inferior dan subordinat (Hofstede, 1980: 373-374).

³⁴ Konsep dari ketidakpastian seringkali dikaitkan dengan lingkungan, termasuk segala sesuatu yang tidak berada di bawah kontrol organisasi. Organisasi mencoba untuk mengkompensasi ketidakpastian melalui teknologi, aturan dan ritual, untuk mengurangi tekanan dari ketidakpastian tersebut (Hofstede, 1980: 373-374).

Tabel 3.7 Posisi Perempuan Jepang di Eksekutif

KABINET	MENTERI	BIDANG
Ikeda Seisaku (Juli 1960~)	-Nakayama Masa	-Kesejahteraan
	-Kondo Tsuruyo	-Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Riset
Nakasone Yasuhiro (November 1982~)	-Ishimoto Shige	-Lingkungan
Kaifu Toshiki (Agustus 1989~)	-Takahara Sumiko	-Perencanaan Ekonomi
	-Moriyama Mayumi	-Sekretaris Kabinet
	-Santo Akiko	-Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Riset
Miyazawa Kiichi (November 1991~)	-Moriyama Mayumi	-Pendidikan

Sumber: Bando Mariko, 2001: 102-103

Seperti yang diungkapkan Iwao (1993), dalam kabinet Kaifu yang pertama --- berdiri Agustus 1989 seiring dengan jatuhnya LDP dalam pemilihan umum--- dua perempuan memang ditunjuk untuk menduduki posisi sebagai menteri untuk yang pertama kalinya. Mereka adalah jurnalis ekonomi Takahara Sumiko, sebagai kepala Agensi Perencanaan Ekonomi, serta veteran politik dan eks-birokrat Moriyama Mayumi sebagai kepala Sekretaris Kabinet. Sebelumnya, Moriyama telah menjabat sebagai kepala Agensi Lingkungan, tetapi ketika kepala Sekretaris Kabinet, Yamashita Tokuo, terlibat skandal perempuan, dan diminta untuk berhenti, Moriyama yang telah berpengalaman dan berperilaku sederhana, dipilih oleh LDP sebagai strategi untuk memunculkan *image* bersih. Sedangkan Takahara, terpilih meskipun belum memiliki pengalaman politik, setelah terjadi kegagalan dalam mempublikasikan penulis novel perempuan. Dalam perkembangannya, Kabinet tersebut dirombak ulang dalam 10 bulan, dan tidak ada lagi perempuan yang menjabat sebagai menteri. Pada Kabinet ketiga Kaifu, seorang aktris Santo Akiko terpilih sebagai kepala Agensi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, tetapi sebagai konsekuensi, tidak ada perempuan dalam pergantian bidang administrasi Miyazawa.

Kejadian ini merupakan akibat dari berlakunya ‘subjektifitas maskulin’ dalam ranah kehidupan politik nasional di Jepang. Perempuan mendapatkan hak untuk menjabat, sebagai suatu konstruksi dari kaum politisi laki-laki di LDP yang ingin memunculkan simpati dari rakyat. Bahkan kedua politisi perempuan itu hanya menduduki jabatan sementara, karena ketika tujuan dari pelaku ---politisi laki-laki di LDP--- telah terwujud, peran kedua politisi perempuan yang kompetensi sesungguhnya belum teruji dengan baik itu pun tidak dibutuhkan kembali.

Iwao (1993) juga menuliskan bahwa sebagai kepala Sekretaris Kabinet, Moriyama juga pernah mengutarakan kepada Perdana Menteri untuk mengkaji ulang agar memungkinkan politisi perempuan profesional mendapat jabatan untuk menjaga kestabilan mayoritas pemilih. Ia merasakan kemarahan kepada partainya sendiri yang tidak bersikap adil kepada politisi perempuan. Tetapi sebagai respon, publik ---baik laki-laki maupun perempuan--- justru tidak melakukan apa-apa untuk mendukung pernyataan Moriyama yang dapat meningkatkan kesetaraan dalam pemilihan. Reaksi masyarakat bahkan menyatakan bahwa Moriyama terlalu keras mengusahakan apa yang diinginkannya, dan sebagai perempuan, ia telah berbicara terlalu banyak (Iwao, 1993: 225). Hal ini merupakan cerminan pandangan tradisional mengenai kualitas perempuan, bahwa perempuan yang baik adalah mereka yang tidak banyak bicara.

Berikut komentar Moriyama Mayumi, sebagai perwakilan di Majelis Tinggi dari Partai Liberal Demokrat dalam *Asahi Shimbun*, 18 Juli 1989:

“Partai Liberal Demokrat tahu persis bahwa kekuatan perempuan adalah sebagai bagian dari mekanisme pemungutan suara. Karena itu, strategi bagi kaum perempuan adalah untuk membuat mereka tertarik sebagai pemilih. Mereka (perempuan) hanya melihat diri mereka sebagai *objek* dari kebijakan, bukan sebagai rekan dalam proses pembuatan kebijakan. Hal ini sangat disayangkan, karena perempuan tidak harus memiliki laki-laki untuk berpikir bagi mereka dan melakukan sesuatu bagi mereka, mereka memiliki kekuatannya sendiri untuk meningkatkan suara dan membuat kebijakan sendiri.” (Iwao, 1993: 223).

Pada periode 1980-an, LDP memang tidak menempatkan perempuan sebagai rekan yang sejajar dengan kaum laki-laki. Ini terutama terlihat dalam pemilihan calon kandidat untuk diikutsertakan dalam Parlemen, yang adalah penyanyi, aktris, dan peraih medali Olimpiade (Iwao 1993: 225). Para perempuan yang duduk di kursi Parlemen pun acapkali tidak mendapatkan orientasi yang cukup mengenai bagaimana para politisi bersikap di Parlemen³⁵. Hal ini menggambarkan kecenderungan partai untuk melihat perempuan dari segi popularitas dan keindahan fisik semata, daripada kemampuan mereka dalam berpolitik. Perempuan hanya dijadikan semacam figur untuk menarik perhatian para pemilih, dan tidak diberi kesempatan untuk benar-benar membuktikan kemampuan nalarnya dalam membuat dan menentukan arah kebijakan politik partai.

Perempuan Jepang, juga cenderung bersikap pasif terhadap pernyataan politis yang memiliki makna yang memarginalisasi perempuan. Iwao (1993) menuliskan, bahwa dalam pidato tahun 1989, Menteri Pertanian memberi pernyataan yang menyebabkan kontroversi. Ia mempertanyakan ketidakbergunaan perempuan di dunia politik, dan mengatakan bahwa perempuan berhasil di berbagai lapangan lain di masyarakat, tetapi tidak dalam Parlemen. Menurutnya, kesuksesan Perdana Menteri Margaret Thatcher adalah karena ia memiliki anak dan suami, ia mengkritik Ketua partai Sosialis, Doi Takako, yang tidak memiliki suami dan anak. Menteri Pertanian beranggapan bahwa kualitas Doi dalam politik hanya dapat dibuktikan setelah ia 'keluar' dari tradisi peran perempuan sebagai istri dan ibu. Pidato tersebut tentu menuai banyak protes, sehingga keesokan harinya Menteri Pertanian membuat konferensi pers dan meminta maaf secara formal. Tetapi sesungguhnya, apa yang dikatakan Menteri Pertanian pada saat itu memang merupakan anggapan umum kaum

³⁵ Menurut Sumiko Iwao (1993), karena para perempuan anggota Parlemen ini tidak menerima orientasi yang cukup mengenai bagaimana para politisi seharusnya bersikap di Parlemen, terkadang pola pikir mereka melahirkan semacam kebiasaan atau aturan baru di Parlemen, yang terkadang disebut juga sebagai feminisme di Parlemen. Contohnya memberi tepuk tangan saat salah seorang anggota partai lain memberi pernyataan. Sejak para anggota Parlemen perempuan ---yang sebenarnya tidak mengetahui adanya aturan untuk memberi tepuk tangan pada pernyataan anggota partai lain--- memberikan tepukan, hal tersebut dianggap sebagai kebiasaan sehingga saat ini tidak berlaku lagi aturan tidak boleh memberi tepuk tangan untuk pernyataan anggota partai lain.

laki-laki di Jepang. Dalam *Yomiuri Shimbun* edisi 9 Juli bahkan terdapat komentar dari salah seorang pembaca laki-laki, yang mengatakan “Tentunya ada banyak laki-laki Jepang yang setuju dengan pernyataan Bapak Menteri” (Iwao, 1993: 224). Dapat dikatakan meski laki-laki tidak berbicara secara eksplisit, tetapi pada kenyataannya pernyataan Menteri mengenai perempuan yang tidak berguna di arena politik, tidak hanya disetujui oleh kaum laki-laki dari partai Liberal Demokrat, tetapi juga kaum laki-laki pada umumnya.

Yang menjadi masalah utama bukanlah perbedaan antara laki-laki dan perempuan, tetapi bahwa laki-laki memandang rendah perempuan, dan perempuan sendiri yang cenderung ‘memaafkan’ cara pandang tersebut dengan bersikap seolah memang peran perempuan tidak cocok dengan bidang politik. Tanggapan kaum perempuan atas pernyataan Menteri juga menjadi semakin menguatkan indikasi rendahnya peran perempuan dalam bidang politik.

3.4.2 Fenomena Doi Takako sebagai Aplikasi Subjektifitas Maskulin dan Gambaran Perempuan Tradisional Jepang

Tahun 1989 menjadi saksi munculnya perubahan besar dalam politik nasional Jepang. Seorang politisi perempuan, Doi Takako³⁶, berhasil menjabat sebagai ketua Partai Sosialis Demokrat (SDPJ), yang merupakan partai oposisi terbesar di Jepang. Namun, apakah keberhasilan yang diraih Doi merupakan tolak ukur dari keberhasilan perempuan di politik? Faktanya, proses naiknya Doi Takako pada jabatan politik strategis sebagai ketua partai, merupakan hal yang juga dikonstruksi berdasarkan kepentingan partai, atau dengan kata lain, para politisi laki-laki juga turut serta membangun ‘*image* fenomenal’ Doi Takako. ‘Subjektifitas maskulin’ terlihat dalam peran partai yang begitu besar terhadap kesuksesan kampanye Doi Takako.

Alasan dibalik pemilihan Doi Takako adalah kekalahan Partai Sosialis Demokrat dalam pemilihan tahun 1986. Setelah sebagian besar pejabat partai mengundurkan diri dari tanggungjawab terhadap kekalahan tersebut, terdapat

³⁶ Doi Takako, terpilih pertama kali pada tahun 1969 untuk menduduki kursi di Majelis Rendah, dan menjadi tokoh penting dalam peningkatan jumlah perempuan dalam Partai Sosialis Demokrat (Sumiko Iwao, 1993: 227).

kesulitan dalam memilih pengganti ketua partai sebelumnya; Ishibashi Masatsugu, yang telah memimpin partai selama tiga tahun. Politisi partai Sosialis Demokrat yang mencalonkan Doi Takako mengatakan;

“Sejujurnya, kami beranggapan Doi Takako sebagai sosok yang ideal dalam pasang-surut politik. Semua orang menyadari hal tersebut. Dalam partai, mereka menyatakan hal-hal menyangkut Doi dan kemampuan perempuan, akan tetapi ketika kesempatan bagi perempuan datang, maka Partai Sosialis sesungguhnya hanya akan menjadi ‘partai kaum laki-laki’; menjalankan partai berdasarkan kepentingan kaum laki-laki. Untuk menyatukan segala sesuatunya sampai seseorang yang tepat datang, pada dasarnya kami akan menjadikan Doi Takako sebagai ketua, untuk mengurus masalah pajak konsumsi dengan kaum perempuan“. (Sumiko Iwao, 1993: 229).

Partai Sosialis Demokrat, dapat menerima Doi Takako sebagai ketua partai hanya karena mereka tahu bahwa hal ini hanya bersifat sementara. Pemilihan perempuan sebagai ketua partai bukanlah karena partai tersebut memiliki kesadaran mengenai pentingnya perubahan peran perempuan di politik, melainkan karena strategi partai, yang akhirnya melahirkan Doi sebagai alternatif pemimpin.

Untuk menarik para pemilih perempuan, partai Sosialis menjadikan aplikasi ‘pajak konsumsi’ yang baru, sebagai isu utama dalam kampanye pemilihan Doi Takako. Hal ini sudah tentu menjadi permasalahan utama kaum perempuan, karena umumnya mereka berbelanja kebutuhan setiap hari dan bertanggung jawab dalam mengatur keuangan rumah tangga. Menurut Iwao (1993), untuk kepentingan ini, terjadi perubahan dalam pandangan politik nasional mengenai peran perempuan. Pada setengah dari kursi Parlemen, terdapat 146 kandidat perempuan yang turut serta memperebutkannya.

Doi Takako, seperti sebagian besar politikus perempuan, tidak secara langsung menginginkan suatu pencapaian dalam karir politik, melainkan ditunjuk oleh orang ataupun kelompok lain yang memiliki kepentingan tertentu. Tidak ada latar belakang keluarga yang dapat mengkaitkan dirinya dengan dunia politik. Doi ditunjuk oleh partainya untuk mendapatkan jabatan resmi, bahkan biaya kampanye

Doi Takako ditanggung oleh partai. Dia dipilih oleh SDPJ sebagai ketua pada tahun 1986, di masa krisis, dan berperan sebagai ‘korban’. Mengapa dikatakan demikian adalah karena perannya sebagai pemimpin partai politik dilihat sebagai strategi partai yang ingin memenangkan lebih banyak suara dalam Pemilu, melalui simpati kaum perempuan terhadap ketidaksetujuan Doi pada pajak konsumsi. Ini adalah contoh nyata dari berlakunya subjektifitas maskulin di partai Sosialis Demokrat; menggunakan tokoh perempuan tidak lebih dari sebagai simbol yang dapat menyelamatkan kepentingan para politisi laki-laki.

Kata-kata yang diucapkan Doi Takako, memang banyak mengundang simpati masyarakat. Dikatakan bahwa kampanye pidato yang dibawakan olehnya dapat memenangkan sekitar 10.000 suara, dan pada masa pemilihan, ia dapat terbang ke seantero negeri karena undangan dari berbagai daerah yang cukup padat. Kemana pun ia pergi, penggemar Doi Takako yang sebagian besar adalah perempuan paruh baya menawarkan bekal makan siang, dan menampakkan berbagai ekspresi dari kepedulian terhadap kesehatan Doi. Namun, bentuk ekspresi ini justru semakin meyakinkan bahwa Doi Takako dilihat bukan sebagai bagian dari sosok para politisi laki-laki, tetapi ia dilihat sebagai sosok yang dekat dengan kehidupan perempuan³⁷.

Skandal seks Perdana Menteri Uno juga semakin meningkatkan kemarahan kaum perempuan, dan mempengaruhi kaum perempuan untuk memilih partai yang tidak akan mengecewakan mereka. Poling yang diadakan sebelum pemilihan

³⁷ Para simpatisan Doi memiliki anggapan yang beragam mengenai figur Doi sebagai pemimpin. Menurut Iwao (1993), beberapa simpatisan beranggapan Doi memiliki kelebihan dalam perkataannya yang jelas dan menggunakan idiom yang mudah dimengerti masyarakat; beberapa terinspirasi oleh harapan dan kepercayaan yang diusung oleh Doi. Karena gayanya yang tidak banyak bicara, substantif, dengan artikulasi yang jelas di saat pidato, tubuh yang tinggi, dan tidak berpenampilan feminin, beberapa juga beranggapan bahwa Doi lebih mudah diterima karena menggunakan cara bersikap selayaknya laki-laki. Sikap Doi terhadap kebijakan pajak konsumsi dengan mengeluarkan pernyataan “*dame na mono wa dame*” atau ‘hal yang tak baik adalah tidak baik’, membuat para simpatisanya menyukai kejelasan Doi dalam mengungkapkan pendapat. Para perempuan Jepang sudah lama mengidamkan politik yang bersih, bebas dari unsur korupsi dan kecurangan. Namun karena tidak sedikit politisi yang beranggapan bahwa mereka mau tak mau harus mau berbuat kotor agar dapat bertahan di dunia politik, maka banyak diantara mereka yang mengkritik Doi Takako sebagai tokoh politisi perempuan yang berpikiran pendek dan tidak bersikap dewasa sebagai seorang politisi. Alasan lainnya mengapa para pemilih memilih Doi adalah karena ia berpenampilan biasa, tidak cantik (meskipun hal ini dapat dikatakan bersifat relatif), dan ia juga tidak termasuk dalam kelompok elit, serta memiliki latar pendidikan kelas menengah (ayahnya adalah seorang psikiater).

memperlihatkan bahwa 34% perempuan “sangat peduli terhadap Pemilu” (Iwao, 1993: 225). Jumlah tersebut hampir tiga kali lipat dari poling yang diadakan tiga tahun sebelumnya. Ini merupakan gambaran bahwa pilihan perempuan dapat membawa perubahan dalam hasil akhir Pemilu.

Seperti yang telah diperkirakan, hasil pemilu menunjukkan bahwa jumlah kursi LDP di Majelis Tinggi menurun secara drastis, dan terjadi peningkatan jumlah kursi yang diduduki perempuan di Majelis Tinggi. Dalam pemilihan Dewan Lokal Tokyo, yang diadakan sebelum pemilihan Majelis Tinggi, sebanyak 17 perempuan terpilih, dan 11 diantaranya berusia tiga puluh dan empat puluh tahunan. Jumlah ini meningkat delapan orang dari pemilihan sebelumnya. Partai Sosialis Demokrat meraih kemenangan di Tokyo, dengan sepertiga dari 36 kandidat terpilih adalah perempuan (Iwao, 1993: 226).

Setelah pemilihan Majelis Tinggi, pemimpin dari Partai Sosialis Demokrat Jepang; Doi Takako, secara otomatis menjadi salah seorang kandidat Perdana Menteri. Ini merupakan pertama kalinya perempuan dinominasikan untuk jabatan Perdana Menteri Jepang. Tetapi, dengan jumlah anggota Partai Liberal Demokrat (LDP) yang sebagian besar menduduki kursi di Majelis Rendah, jabatan Perdana Menteri akhirnya jatuh kepada kandidat dari LDP, Kaifu Toshiki. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, Majelis Rendah memang memiliki pengaruh yang lebih besar dari Majelis Tinggi dalam pengambilan keputusan. Politik nasional menempatkan lebih banyak perempuan di Majelis Tinggi, sehingga mereka tidak dapat berperan penting dalam pengambilan keputusan Parlemen. Kabinet Kaifu yang pertama memang mengikutsertakan dua orang perempuan; Takahara Sumiko dan Moriyama Mayumi, tetapi dalam periode jabatan yang cukup singkat.

Meskipun perempuan telah mengalahkan LDP dalam pemilihan Majelis Tinggi merupakan hal yang patut disadari, tetapi partisipasi mereka dalam politik, dari sudut pandang kaum laki-laki, terlihat sebagai suatu kemunculan yang sementara, dan hanya merupakan semacam kepopuleran yang dipengaruhi faktor emosional mereka; yaitu sebagai bentuk perlawanan terhadap pajak konsumsi yang

baru. Dapat dikatakan ini merupakan cara kaum pria untuk mendekatkan peran perempuan di politik sedekat mungkin dengan norma-norma tradisional.

Tidak sedikit politisi yang beranggapan bahwa Doi hanya merupakan politisi yang berpikiran pendek. Selain isu untuk menghilangkan pajak konsumsi, sangat sulit untuk menemukan kebijakan dimana Doi Takako bertanggungjawab di dalamnya. Bahkan dalam isu mengenai pajak konsumsi, ia tidak dengan jelas mengemukakan solusi, maupun jalan keluar alternatif yang spesifik dari permasalahan tersebut.

Ketidaksiapan Doi sebagai pemimpin partai semakin terlihat di akhir masa jabatannya. Doi memang secara jelas mengungkapkan pandangannya mengenai isu-isu yang berkembang di kancah politik, tetapi ia tidak pernah secara langsung menangani sendiri masalah tersebut di belakang layar. Contohnya pada krisis *Persian Gulf* pada tahun 1990, dimana dibutuhkan keputusan secara cepat, Doi tetap bersikap keras kepala menolak partisipasi pasukan *Self-Defence* Jepang, serta menolak partisipasi Jepang dalam United Nation, organisasi perdamaian dunia (Iwao, 1993: 233). Karena kegagalan ini, sebagian besar pemilih kehilangan kepercayaan terhadap partai Sosialis Demokrat, dan pada pemilihan April 1991, kekalahan tak dapat terelakkan, sehingga Doi mengundurkan diri pada bulan Juli 1991.

Pada pemilihan Majelis Rendah satu tahun kemudian, di bulan Februari 1990, jumlah kandidat perempuan berjumlah 66 orang, dua kali lipat dari kandidat pada pemilihan empat tahun sebelumnya. Tetapi kali ini, pemilih yang lebih dari setengahnya adalah kaum perempuan, lebih berhati-hati untuk tidak merusak stabilitas yang terjalin selama ini. Para perempuan juga tidak memilih untuk membuat suatu reformasi politik yang besar dengan memilih oposisi, yang dapat merubah jalur pemerintahan.

Mungkin secara tidak sadar, perempuan terkadang membuat keputusan politik berdasarkan asumsi tradisional 'istri yang baik, ibu yang bijaksana'. Perempuan mungkin memilih Partai Sosialis Demokrat karena LDP akan mendapatkan keuntungan dari sikap perempuan yang ingin membuat LDP seolah jera. Sesungguhnya para perempuan Jepang tidak benar-benar siap untuk menyerahkan

kepemimpinan LDP, dan memberikan kekuasaan politik pada partai oposisi. Gambaran tradisional mengenai 'istri yang baik' terlihat dalam cara memilih ini.

Banyak pula yang mempertanyakan, apakah Doi akan menjadi yang pertama dan yang terakhir sebagai tokoh sentral perempuan dalam partai politik Jepang. Ia memang suatu bentuk ketidakbiasaan dalam perpolitikan Jepang. Doi berkontribusi besar sebagai *Joan of Arc* dalam masyarakat Jepang yang didominasi kaum laki-laki. Doi tidak memiliki kebijakan yang konkret untuk dibicarakan, dan hanya bermain aman dengan isu pajak konsumsi serta peningkatan jumlah politisi perempuan di Parlemen, sehingga dapat dikatakan ia adalah tokoh yang dihadirkan untuk memenuhi keinginan para pemilih perempuan. Tetapi pengaruh Doi yang terbesar, sebagaimana diungkapkan oleh penulis Hashimoto Osamu (Iwao, 1993: 223), adalah perannya dalam mengubah para perempuan paruh baya yang selama ini duduk diam, untuk maju dan berani mengungkapkan pendapatnya. Karena mereka beranggapan 'jika Doi bisa, begitu juga dengan kami'.

Meskipun Konstitusi pasca Perang telah turut serta mengklaim adanya kesetaraan gender, tetapi pada kenyataannya, perempuan masih dikenakan status sebagai yang 'nomor dua'. Kehadiran Doi Takako memang menjadi suatu perubahan besar dalam politik Jepang, yang pada akhirnya mampu membawa (sedikit banyak) perubahan ke bidang-bidang lainnya, seperti memunculkan kesempatan bagi perempuan untuk aktif di masyarakat melalui gerakan konsumeritas dan anti polusi. Tidak sedikit pula perempuan yang terinspirasi dan menjadi aktif dalam aktifitas politik lokal yang selama ini tidak pernah mereka sentuh. Ia juga memberi perubahan terhadap anak-anak, dimana selama ini mereka hanya melihat laki-laki sebagai pemimpin di televisi, sehingga kemunculan perempuan sebagai pemimpin dapat mengubah cara pandang mereka tentang figur pemimpin ideal yang selama ini dikonstruksi laki-laki.

3.5 Peran Perempuan dalam Politik Nasional Jepang 1980-1990; Analisis Menurut 'Tatanan Simbolik' Jacques Lacan

Pada periode 1980-1990, kesadaran perempuan Jepang untuk berpartisipasi dalam politik nasional Jepang dapat dikatakan meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, terutama di akhir periode 1980-an, dengan puncaknya yaitu terpilihnya Doi Takako sebagai ketua Partai Sosialis Demokrat (SDPJ). Akan tetapi, kita perlu membuka mata terhadap fakta yang terjadi, bahwa keterkaitan perempuan di arena politik, masih berhubungan erat dengan konstruksi yang dibentuk oleh kaum laki-laki, berdasarkan kepentingan dan pandangan yang dianggap ideal oleh mereka. Lebih jauh lagi, peran perempuan Jepang dalam politik nasional tahun 1980-1990 masih 'dekat' dengan gambaran perempuan tradisional, dimana peran-peran perempuan masih dilekatkan dengan ruang lingkup domestik mereka.

Lacan berpendapat bahwa setiap masyarakat diatur oleh rangkaian tanda, peran dan ritual yang tidak saling berhubungan, yang diistilahkan oleh Lacan sebagai 'tatanan simbolik'. Konsep yang dikemukakan oleh Lacan ini, khususnya dalam masyarakat patriarki, menjadikan 'tatanan ayah' sebagai suatu aturan tak tertulis yang menjadi sumber pandangan ideal masyarakat mengenai nilai-nilai yang berlaku di dalam kehidupannya. Masing-masing dari 'tatanan simbolik' memiliki pengaruh yang kuat terhadap pola pikir individu, yang pada akhirnya akan membentuk pola pikir masyarakat, dan membentuk konstruksi ideal mengenai pandangan terhadap suatu nilai dari aturan, norma, peran, dan sebagainya. Hal yang ada dalam ranah ketidaksadaran individu, memiliki pengaruh yang besar terhadap bagaimana sang individu memutuskan sesuatu, karena keputusan tersebut mengacu pada aturan tak tertulis yang ada di alam pikirannya. Aturan tersebut dalam prosesnya akan berinteraksi dengan dunia riil, dan menciptakan konsesi umum di masyarakat.

Pada kasus Jepang, 'tatanan simbolik' dalam masyarakat terbentuk melalui proses yang tidak sebentar, dan melalui berbagai akulturasi antara budaya Jepang, dengan budaya non-Jepang, seperti budaya Cina, maupun Barat. Nilai-nilai simbolis dalam masyarakat memang tidak bersifat abadi, tetapi tidak dapat serta merta diubah secara singkat melalui intervensi sosial, maupun aturan hukum tertentu, misalnya dengan diberlakukannya Konstitusi Jepang Baru yang di dalamnya juga berisi tentang konsep kesetaraan gender.

Mengenai peran perempuan Jepang dalam politik, khususnya pada periode 1980-1990, terlihat bahwa konsep ‘Tatanan Simbolik’ memiliki pengaruh yang kuat terhadap keikutsertaan perempuan dalam politik yang faktanya, juga dikonstruksi menurut kepentingan dan pandangan umum kaum laki-laki. Berikut analisis mengenai peran perempuan dalam politik nasional Jepang 1980-1990, berdasarkan konsep ‘tatanan simbolik’ Jacques Lacan;

3.5.1 Analisis Menurut Konstruksi ‘Tanda’ Terhadap Peran Perempuan dalam Politik Nasional Jepang 1980-1990

Seperti yang telah dipaparkan dalam Bab II, baik Saussure maupun Peirce, mengemukakan bahwa ‘tanda’ merupakan norma, aturan sosial yang hadir melalui intervensi sosial. Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Iwao (1993), terkadang para politisi laki-laki menganggap peran perempuan di bidang politik sudah cukup dengan menjadi istri kandidat atau istri anggota Parlemen. Hal ini seringkali diasumsikan sebagai bentuk lain dari norma tradisional yang berkaitan dengan sistem *Ie* serta dan doktrin *ryoosaikenbo*, dimana para perempuan, sebagai istri ---yang mengurus masalah domestik dan berperan sebagai pendamping suami--- yang baik, dapat mengaktualisasikan diri melalui kesuksesan suami mereka. Para perempuan ini terjun ke arena politik untuk menggantikan suaminya yang sakit, menjadi istri kandidat atau istri anggota Parlemen. Sekali lagi, hal ini sesungguhnya hanya merupakan bayangan dari kesuksesan suami-suami mereka.

Menurut Mackie (2003), para istri tersebut, umumnya bertanggung jawab untuk mengumpulkan suara. Mereka harus belajar menarik simpati masyarakat, seperti dengan berbusana yang baik, bicara yang tidak mengundang kritik, dan harus berhati-hati untuk menggunakan etiket yang baik; seperti cara melakukan salam yang baik, dan lainnya, agar tidak dianggap arogan dan sombong. Mereka mendedikasikan diri untuk mendukung para simpatisan suami mereka, seperti dengan mengunjungi rumah sakit, memberi hadiah pada pernikahan putri tokoh masyarakat setempat, datang di acara olah raga daerah, dsb.

Salah satu istri politikus ternama yang berhasil mendukung kesuksesan suaminya adalah Kaifu Sachiyo (Kaifu merupakan Perdana Menteri Jepang tahun 1989-1991), yang memberi dukungan pada berbagai aktifitas politik suaminya selama sekitar 27 tahun. Dengan mengikuti saran dari pendukungnya, ia selalu membungkukkan badan ketika menyalami para pendukungnya. Meskipun para istri kandidat tidak dapat menginterfensi kebijakan politik suaminya, dan hanya dapat berpartisipasi dengan mendukung karir politik suaminya, peran ini seringkali dikaitkan dengan aktualisasi diri mereka (Iwao, 1993: 222). Suatu bentuk aktualisasi yang sifatnya tidak utuh, karena aspirasi yang sesungguhnya, tidak dapat disampaikan oleh para istri kandidat ini.

Perempuan Jepang pada periode ini juga masih tunduk kepada norma yang dibangun berdasarkan persepsi kaum laki-laki. Meskipun sebagian besar perempuan Jepang juga tidak merasa keberatan dengan perannya sebagai ibu dan istri yang baik, tetapi norma yang secara tak tertulis menyatakan bahwa 'perempuan tidak pantas untuk berada di area politik', semakin menyulitkan perempuan untuk mendapatkan kebebasan dalam menentukan sikap dalam area politik. Tidak semua perempuan menginginkan kesempatan untuk bersikap 'aktif' di dunia yang telah mendapat stigma 'kotor' dari masyarakat umum. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa tanpa representasi di politik, hak-hak perempuan, suara, serta pendapatnya tidak dapat tersampaikan pada dunia publik. Sebagai implikasinya, 'tatanan ayah' akan semakin mendominasi masyarakat, dan akan semakin sulit untuk bertidak di luar norma yang dikonstruksi kaum laki-laki.

Pada periode 1980-1990, indikasi munculnya keinginan perempuan untuk aktif dalam politik memang terlihat, dan hal ini sudah menjadi permulaan yang baik untuk mengubah cara pandang tradisional yang berpihak kepada kaum laki-laki. Keberadaan norma, atau aturan sosial, sesungguhnya dimaksudkan untuk menciptakan harmonisasi dalam masyarakat, seperti yang dikembangkan dalam ajaran Konfusianis. Akan tetapi, apabila norma yang berlaku sudah membatasi kebebasan individu tertentu ---dalam hal ini perempuan--- untuk mendapatkan haknya, khususnya di ruang publik, maka masyarakat perlu mengkaji ulang norma

tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan pada perubahan ke arah yang lebih baik dalam masyarakat.

Pandangan mengenai ‘yang lebih baik’ memang bersifat relatif, dan pada kasus Jepang, umumnya masyarakat ---termasuk perempuan--- masih menganggap keteraturan dan harmoni dalam kehidupan adalah faktor penting untuk meraih kebahagiaan hidup. Karena itu kontribusi mereka terhadap perubahan norma dapat dikatakan cukup rendah, mengingat mereka memilih untuk memperoleh keadaan yang aman dan tenteram. Hal ini memang tidak dapat disalahkan, tetapi perlu dikaji ulang oleh masyarakat Jepang sendiri, untuk mewujudkan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki.

3.5.2 Analisis Menurut Konstruksi ‘Peran’ Terhadap Peran Perempuan dalam Politik Nasional Jepang 1980-1990

Walaupun pada periode 1980-1990, terdapat peningkatan jumlah perempuan yang duduk di Parlemen, tetapi partisipasi peran perempuan Jepang dalam politik nasional masih terbilang rendah. Hal ini berkaitan erat dengan proses sosialisasi peran gender yang mempengaruhi pandangan perempuan Jepang mengenai peran politik. Dengan gambaran perempuan yang dilekatkan dengan peran domestik, *motherhood*, serta menjadi simbol dari cinta dan kasih sayang, prioritas sebagian besar perempuan Jepang tentunya adalah keluarga; kepengurusan suami, pendidikan anak, kesehatan dan kesejahteraan keluarga serta lingkungan. Peran politik dianggap sebagai peran ‘laki-laki’ sebagai penentu keputusan.

Memang tidak ada yang salah apabila perempuan memainkan peran yang dominan dalam kehidupan domestik, tetapi sudah saatnya masyarakat Jepang menyadari perlunya penyerataan kesempatan bagi perempuan, untuk menyampaikan maksud dan pendapatnya dalam arena politik, yang dimaksudkan bagi kemaslahatan seluruh masyarakat Jepang sendiri. Apabila kaum perempuan merasakan ketidaknyamanan dalam penempatannya pada peran domestik, maka masyarakat perlu meninjau ulang tujuan dari sosialisasi peran gender.

Laki-laki memiliki superioritas, dan muncul pula anggapan bahwa perempuan memiliki beberapa keterbatasan yang pada akhirnya membuatnya termarginalisasi. Laki-laki memimpin, membuat keputusan, dan menjadi dasar bagi unit masyarakat, dasar keluarga. Hal yang telah menjadi rantai dalam komunitas; perempuan patuh pada laki-laki, dan laki-laki patuh pada masyarakat, masyarakat tunduk kepada sistem. Sebagai hasilnya, sistem yang terbentuk berdasar pada subjektivitas kaum laki-laki, dan di dalamnya tercipta suatu keharmonisan yang dibentuk untuk menjaga superioritas kaum laki-laki, baik disengaja maupun tidak.

Meski sebagian besar perempuan seolah menerima sosialisasi perannya dalam urusan domestik, tetapi ketiadaan perempuan dalam arena publik, terutama yang membahas dan memberi keputusan dalam urusan vital, dapat dilihat sebagai suatu indikasi yang membuat para perempuan tidak didengar aspirasi dan pendapatnya. Karena itu, peningkatan peran perempuan di bidang politik merupakan hal yang penting untuk menciptakan iklim kesetaraan gender.

Di Jepang, alasan utama mengapa wanita sulit untuk terjun ke dunia politik, juga berhubungan peran dominan laki-laki di dunia publik. Walaupun tidak ada aturan yang secara spesifik menyebutkan laki-laki yang dominan, tetapi dunia publik dikontrol oleh kaum laki-laki. Dalam politik nasional Jepang ---terkecuali pada kasus Majelis Tinggi--- untuk menjadi politisi, seseorang harus mendapat dukungan dari partai politik, membuat kampanye resmi yang membutuhkan dukungan dana yang tidak sedikit, mengorganisir para simpatisan partai, dan melakukan segala kemungkinan untuk mendapatkan dukungan dari para simpatisan yang bersikap loyal. Segala kegiatan tersebut, dianggap tidak sejalan dengan peran perempuan tradisional yang identik dengan *image* lembut, sopan, beretika, dan dekat dengan nilai-nilai kebaikan, kejujuran, dan kasih sayang.

Para kandidat yang bertarung dalam memperebutkan kursi Parlemen, juga harus mengeluarkan sejumlah uang untuk memberi semacam 'hadiah' ---terkadang langsung berupa uang--- seperti pada acara pernikahan, pemakaman atau upacara-upacara lainnya yang menyangkut simpatisan dari partai maupun kandidat yang berkepentingan. Hal ini dilakukan dengan maksud membangun ikatan yang kuat

antara mereka dan berharap pendukungnya akan memilihnya pada saat pemilihan berlangsung. Semakin besar uang yang dikeluarkan para kandidat, semakin kecil peluangnya untuk kalah (Iwao, 1993: 220). Sekalipun politisi perempuan tersebut memiliki ambisi yang kuat untuk meraih jabatan di Parlemen, tentu keberadaan politik uang yang tidak dapat dipungkiri ini akan sangat menyulitkannya untuk meraih tujuan tersebut. Sebagian besar perempuan juga merasa bahwa 'pekerjaan kotor' dari politik ini, tidak sesuai dengan nilai-nilai kebaikan yang telah melekat di alam pikiran mereka selama ini. Sehingga, banyak diantara mereka yang berpikir lebih baik tidak berperan aktif dalam politik daripada harus bekerja melawan kehendak hati nurani.

Pada periode 1980-1990, memang terdapat peningkatan peran perempuan dalam politik nasional, akan tetapi, apabila melihat kembali maksud dan tujuan diposisikannya perempuan dalam arena politik, masih terlihat dominasi peran kaum laki-laki dalam mewujudkannya. Anggapan bahwa peran perempuan berkaitan dengan lingkup domestik, bahwa perempuan tidak cocok dengan pekerjaan teoritis maupun intelektual dalam berbagai kasus, serta bahwa pertanyaan maupun pernyataan politik yang vital dikuasai oleh laki-laki, memang berakar kuat dalam ranah ketidaksadaran kaum laki-laki maupun perempuan Jepang.

Banyak yang tidak percaya bahwa perempuan Jepang dapat meraih kesuksesan dalam dunia yang penuh dengan politik uang serta perjanjian di belakang layar. Politik, menggunakan standarisasi yang berbeda dengan kehidupan sehari-hari, dimana perempuan seringkali dikaitkan dengan kehangatan, kasih sayang, kelembutan, sehingga dunia politik dianggap kurang pantas untuk dimainkan oleh perempuan. Banyaknya kaum laki-laki, terutama laki-laki paruh baya, yang mengkritik keras Doi Takako, merupakan salah satu akibat dari sosialisasi peran gender yang menempatkan laki-laki di posisi dominan. Doi dianggap telah melangkahi stereotipe perempuan secara umum, sehingga perilaku tersebut dianggap tidak pantas. Apabila masyarakat Jepang, khususnya para laki-laki paruh baya tersebut, mau terbuka terhadap perubahan, Doi yang meraih posisi sebagai pemimpin partai semestinya dapat dipandang sebagai realisasi dari bentuk kesetaraan

kesempatan, yang telah diusung dalam Konstitusi Jepang Baru. Perubahan atas stereotipe gender ini memang akan memakan waktu yang lama dan tidak mudah, karena sudah mengakar kuat dalam pemikiran masyarakat umum, baik laki-laki maupun perempuan.

Tidak seperti pada area lain dalam masyarakat seperti bidang pekerjaan, sosial, dan sebagainya, dimana peran wanita telah menunjukkan perubahan yang cukup signifikan, di bidang politik, hal tersebut cenderung sulit. Perempuan pada umumnya masih bersikap apatis untuk memasuki dunia politik, dan tidak memandang kebijakan politik sebagai alat yang penting untuk memperoleh kondisi yang lebih baik bagi perempuan. Pandangan tradisional dalam masyarakat beranggapan bahwa perempuan tidak semestinya berada di arena bisnis yang berkaitan dengan kekuasaan. Ekspektasi masyarakat mengenai peran perempuan di dunia politik nyatanya semakin memberatkan perempuan untuk mendapatkan kekuasaan dalam area publik.

3.5.3 Analisis Menurut Konstruksi ‘Ritual’ Terhadap Peran Perempuan dalam Politik Nasional Jepang 1980-1990

Ritual, seringkali dikaitkan dengan hal yang sakral, serta berasosiasi dengan dunia supranatural maupun arwah, tetapi sebagian ritual juga dekat dengan hal yang bersifat duniawi, berkenaan dengan moral, kebenaran, dan relasi antar manusia. (Bremen, 1995: 9). Ritual juga bukan merupakan sesuatu yang serta merta tercipta, tetapi merupakan praktik yang tercipta melalui proses, dan hanya tercipta dalam bentuk-bentuk kebudayaan tertentu, serta diekspresikan secara berbeda oleh masyarakat sesuai sejarah dan konteks budaya tertentu.

Sejalan dengan pernyataan Bell (1992), yang membuat proses ritual di Jepang dapat berjalan seiring proses perkembangan sejarah dan intervensi sosial adalah karena tiap individu dalam masyarakat Jepang lebih menekankan pada *bagaimana* segala sesuatu terjadi, daripada *mengapa* sesuatu terjadi, sehingga yang menjadi titik beratnya bukan mengenai rasio, melainkan hal yang dipelajari suatu masyarakat dari generasi sebelumnya.

Ritual memegang peranan penting dalam mengkoordinasikan aktifitas yang bersifat kontinyu dalam suatu relasi sosial. Apabila dihubungkan dengan konsteks perempuan dalam bidang politik, dapat dikatakan hubungan antara ritual dan peran perempuan Jepang dalam politik tidak dapat dilihat secara langsung. Akan tetapi, perannya dalam mengkonstruksi cara pandang perempuan mengenai diri dan lingkungannya juga turut serta melatarbelakangi pandangan perempuan Jepang mengenai dunia politik.

Sebagai negara yang menggunakan sistem patriarki, di dalam bidang ritual dan keagamaan, laki-laki Jepang juga memainkan peranan yang dominan. Pada beberapa ritual publik, seperti yang dijelaskan di Bab II, laki-laki memainkan peranan penting, yang menyangkut upacara utama dari ritual yang dikerjakan. Sedangkan perempuan, sebelum memasuki usia tertentu ---sekitar 40 tahun ke atas---, tidak dapat memainkan peran yang dominan dalam ritual publik. Perempuan juga lebih banyak diposisikan dalam urusan yang menyangkut sifat domestik, seperti menyiapkan makanan dalam upacara-upacara besar. Sebagai gambaran umum mengenai hubungan antara perempuan dan ritual di Jepang, dapat dikatakan bahwa perempuan memegang peranan penting dalam ritual yang berkenaan dengan penjagaan dan perlindungan keluarga. Apabila laki-laki mengambil peran dalam ritual-ritual publik yang memiliki nilai politis maupun agamis, perempuan masih bergerak di area yang domestik; dalam ritual yang berhubungan dengan kesehatan, kesejahteraan keluarga, serta pemujaan terhadap leluhur keluarga.

Dalam sistem kepercayaan maupun agama yang berkembang di Jepang, seperti Konfusianis dan Budhisme (lihat Bab II), implementasi dari kultur patriarkal di dalamnya, semakin menyebar luas dalam pandangan masyarakat Jepang, terutama pada masa kekuasaan feodal hingga era Meiji. Bahkan setelah memasuki periode pasca Perang pun, perempuan masih belum dapat keluar sepenuhnya dari stereotipe ini.

Ajaran Konfusianis mementingkan keharmonisan sebagai tujuan utama demi menciptakan perdamaian di dunia (lihat Bab II). Disebutkan dalam paham Konfusianis bahwa bumi dan segala yang ada di dalamnya, merupakan subjek dari

hukum Surga. Segala aktifitas di muka bumi ini harus selaras dan harmonis dengan hukum Surga, prinsip dasar keadilan, kebaikan, kebahagiaan, dan pemerintah yang merupakan perwakilan dari surga. ‘Laki-laki’, ditempatkan dalam posisi utama di dunia, dimana segala pemikirannya dianggap sebagai manifestasi tertinggi dari aktifitas surgawi, sehingga diwajibkan bagi mereka untuk hidup harmonis dengan hukum surga (Smith, 1959: 2).

Sosok laki-laki yang menjadi panutan, merupakan dasar dari sistem patriarki yang berlangsung selama ratusan tahun, dan mau tidak mau, stigma ini sangat mempengaruhi pola pemerintahan dan jalannya dunia politik di Jepang. Sesuai dengan ajaran Konfusianis, laki-laki sebagai penentu keputusan utama dalam keluarga, masyarakat, sampai institusi negara, adalah suatu hal yang sesuai dengan hukum surga, dan sudah semestinya.

‘Lima hubungan dasar’ yang menjadi salah satu konsep hubungan dalam ajaran Konfusianis, menjadi esensi dasar harmonisasi dalam segala bidang masyarakat, atau disebut juga sebagai ‘*Doctrine of the Mean*’. ‘Lima hubungan dasar’ menggambarkan dual hubungan yang sifatnya yang satu di bawah yang lain, yang terdiri dari; atasan-bawahan, ayah-anak lelaki, suami-istri, kakak-adik, dan hubungan antar teman. Masuknya hubungan suami-istri ke ‘lima hubungan dasar’ menggambarkan aturan Konfusianis yang meninggikan posisi laki-laki dan merendahkan posisi perempuan, meskipun tujuan dasar dari diberlakukannya ajaran ini adalah untuk mencapai kesejahteraan yang abadi.

Dalam perpolitikan di Jepang, aplikasi dari ‘lima hubungan dasar’ terlihat dalam peran serta para istri politikus dalam mendukung kampanye suaminya. Ini merupakan bentuk pengabdian dan dukungan terhadap sang suami. Hal ini memang bukan hal yang negatif, karena peran perempuan tersebut memang dimaksudkan untuk kepentingan kedua suami-istri, tetapi yang menjadi masalah adalah apabila hal ini sudah cukup dianggap mewakili representasi perempuan di bidang politik.

Kemunculan beberapa tokoh politik di periode 1980-1990 sesungguhnya juga membawa angin segar kepada kaum perempuan, karena sebagian besar kandidat di tahun 1989, yang berasal dari Partai Sosialis Demokrat yang dipimpin Doi Takako,

bukan berdasar pada latar belakang keluarga politisi. Doi sendiri bukan merupakan tokoh dengan latar belakang keluarga politikus. Hal ini setidaknya menjadi momentum yang penting bagi para perempuan Jepang untuk menunjukkan kemandiriannya dalam berpolitik, meskipun tentu saja, laki-laki juga turut melatari keberhasilan para perempuan tersebut dengan membuka kesempatan bagi Doi Takako untuk memenangkan Pemilu, melalui strategi partai dan pemberian dana kampanye.

